

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sekarang ini sedang mengalami perkembangan dan penambahan yang sangat pesat terutama di bidang infrastruktur. Hal ini terlihat perkembangan infrastruktur di pulau-pulau besar contohnya Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Pulau lainnya. Oleh sebab itu untuk meninjau seberapa baik atau buruk infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini.

Infrastruktur merupakan hal pokok disetiap wilayah, kawasan, karna meliputi banyak hal pendukung yang dapat mempercepat suatu pekerjaan, waktu yang dibutuhkan, alat yang digunakan bahkan biaya. Infrastruktur meliputi jalan, bangunan gedung, bangunan air, jalur transportasi, dan perlengkapan yang mempengaruhi suatu bentuk bangunan yang nyata. Dibatasi oleh waktu (*time*), biaya (*cost*), dan mutu (*quality*). Proyek konstruksi

Negara Indonesia harus mempublikasikan laporan struktur dan laporan status yang didapatkan. Seperti Amerika Serikat ASCE (1998), sudah mempublikasikan beberapa laporan struktur dan sejumlah laporan status yang dimutakhirkan datanya sehingga berpotensi untuk memberi solusi dalam peningkatan infrastruktur pada saat ini dan masa yang akan datang. Dalam perkembangannya infrastruktur di negaranya, ASCE telah membentuk panel

pakar yang terdiri dari berbagai bidang konsentrasi infrastruktur yang memiliki reputasi nasional untuk menentukan lingkup dan penilaian, juga anggaran yang dibutuhkan. Negara Australia pada tahun 2001 yang sudah menggunakan cara atau model Amerika Serikat untuk membuat penilai infrastruktur di Australia.

Sejak dikeluarkannya laporan infrastruktur pada tahun 1988, studi ASCE selanjutnya menunjukkan bahwa pada dekade berikutnya nilai infrastruktur di Amerika semakin parah dan tingkat nilai berkurang rata-ratanya. Berkurangnya tingkatan nilai rata-rata disebabkan oleh menurunnya nilai infrastruktur sekolah, penyedia air bersih, jalan, dan dam. Nilai tersebut mengejutkan anggota komisi, banyak praktisi dan pengamat dari anggota masyarakat yang peduli pada infrastruktur. Sedangkantahun 2001, menunjukkan adanya peningkatan ke nilai C+, namun pada tahun 2005 kembali turun ke D.

Indonesia International Infrastructure and Exhibition 2012 (IIICE2012), memberikan pandangan yang kritis untuk industri infrastruktur seperti Energi Pembangkit Daya dan Distribusi, Teknologi informasi dan komunikasi, Transportasi jalan, udara, laut dan air serta dan manajemen air dan limbah. Penilai kelayakan infrastruktur merupakan suatu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya.

Infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam

lingkup sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh, kegiatan perekonomian penduduk suatu wilayah mungkin dapat ditampung pada ruang lingkup yang berupa sarana perekonomian, seperti kawasan perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki oleh wilayah tersebut, tetapi tanpa dukungan penyediaan jaringan infrastruktur yang baik, sebagai contoh seperti jaringan jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, dan sanitasi, kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono, 2006).

Menurut Catanese, Anthony J., dan Jamse C.S (1979:120) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya dan kepeduliannya.

Infrastruktur ini berfungsi untuk melancarkan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah, kegagalan pembangunan infrastruktur lebih disebabkan karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal

perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharannya. Mengingat infrastruktur merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur pertumbuhan dan perkembangan suatu kota dan merupakan pendukung bagi perkembangan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan. Maka infrastruktur ini harus dikenali dalam kaitan dengan kegiatan dan fungsi sosial dan ekonomi wilayah yang didukung dan dipeloporinya. Misalnya kualitas lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan fisik, kualitas dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan (infrastruktur), serta keberadaan tingkah laku sosial masyarakatnya. Melihat pentingnya pembangunan infrastruktur permukiman ini, maka keberadaannya ini harus benar-benar tepat guna, artinya tepat tempatnya dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu maupun tidak disediakan oleh pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pendanaan

Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan dana inilah maka muncul urutan prioritas dari apa yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan

Keberadaan lembaga pengelola yang menangani masalah perencanaan infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan. Mulai dari siapa yang merencanakan, melaksanakan, sampai pada yang memelihara hasilnya nanti.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur permukiman untuk wilayahnya. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalamsuatu perencanaan pembangunan infrastruktur mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selalu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

5. Kondisi Fisik Lingkungan

Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistim perencanaan, topografi yang datarakan lebih mudah direncanakan dari pada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman adalah hidrologi, curah hujan, geologi tata lingkungan dan struktur tanah.

6. Bencana Alam

Faktor bencana alam sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam merancang dan membangun infrastruktur. Untuk mengurangi kerusakan akibat bencana maka harus memperhatikan konfigurasi (bentuk, ukuran, ketinggian, dan orientasinya), intensitas dan frekuensi ancaman bencana di suatu wilayah, standar rancangan struktural dan non struktural, pilihan bahan/material inti dan pendukung serta kualitas konstruksinya.

7. Peran serta Masyarakat

Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.

Sebagai provinsi yang sedang berkembang, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memantau sejauh mana kemampuan dan

potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya.

Sebagai provinsi yang sedang berkembang, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya. Menurut Tataruang dinas PU Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa kondisi infrastruktur di wilayah Kota Jawa Barat seperti jalan darat yang sudah diaspal dalam Kota Jawa Barat. Untuk itu sejak tahun 2009 hingga 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membangun jalan sepanjang 7,9 kilometer serta jembatan sebanyak 7 buah. Selain itu, telah dilakukan peningkatan jalan sepanjang 367,57 kilometer, pergantian jembatan sepanjang 485,9 meter, merehabilitasi jalan sepanjang 505 kilometer dan rehabilitasi jembatan sepanjang 2.226,5 meter.

Sepanjang tahun 2011 lalu telah tuntas pembangunan 159 jembatan dengan total panjang mencapai 4.310,9 meter. Termasuk 2 jembatan yang akan diresmikan pada bulan April ini, yakni Jembatan Ciselang (51,7 meter) dan Cisadea (122,4 meter). Kedua jembatan itu dibangun dengan biaya mencapai Rp 27,66 miliar. Sehingga seluruh jalur horizontal kawasan Jawa Barat Selatan sudah terhubung dengan jalan dan jembatan. "Dalam kurun waktu 2008 hingga 2011, Pemerintah Provinsi menggelontorkan Rp 220,6 miliar untuk infrastruktur kawasan Jabar Selatan. Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan jalan

sepanjang 32,35 kilometer, rehabilitasi jalan 57,6 kilometer, rehabilitasi jembatan 380 meter dan pergantian jembatan 155 meter.

1.2 Rumusan Masalah

Mengetahui kelayakan infrastruktur yang sudah mendukung kegiatan sosial pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan

Meninjau dan menilai sejauh mana fungsi dan kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat serta memberikan informasi biaya atau anggaran yang dibutuhkan.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi: bandara atau pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, jembatan dan jalan (nasional, provinsi dan kabupaten), air minum, telekomunikasi dan listrik di kota Jawa Barat.

1.5 Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Persepsi Insinyur Teknik Sipil Mengenai Kelayakan Infrastruktur Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.6 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana penilaian kelayakan yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.
2. Sebagai tolok ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.